



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN MONITORING

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2023





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	lin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan	05/10/2023	
2.	Dikonsep	Rizki Azkiya, S. Pd	Pengadministrasi Umum	05/10/2023	
3.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	06/10/2023	
4.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	06/10/2023	
5.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra S.SiT., MM	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	16/10/2023	
6.	Disetujui	Nanang Rahardjo, S.H., M.H.	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	10/10/2023	
7.	Disetujui	Rudu Sutrisno, ATD	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	17/10/2023	

Kata Sambutan



Kata Sambutan



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2023.

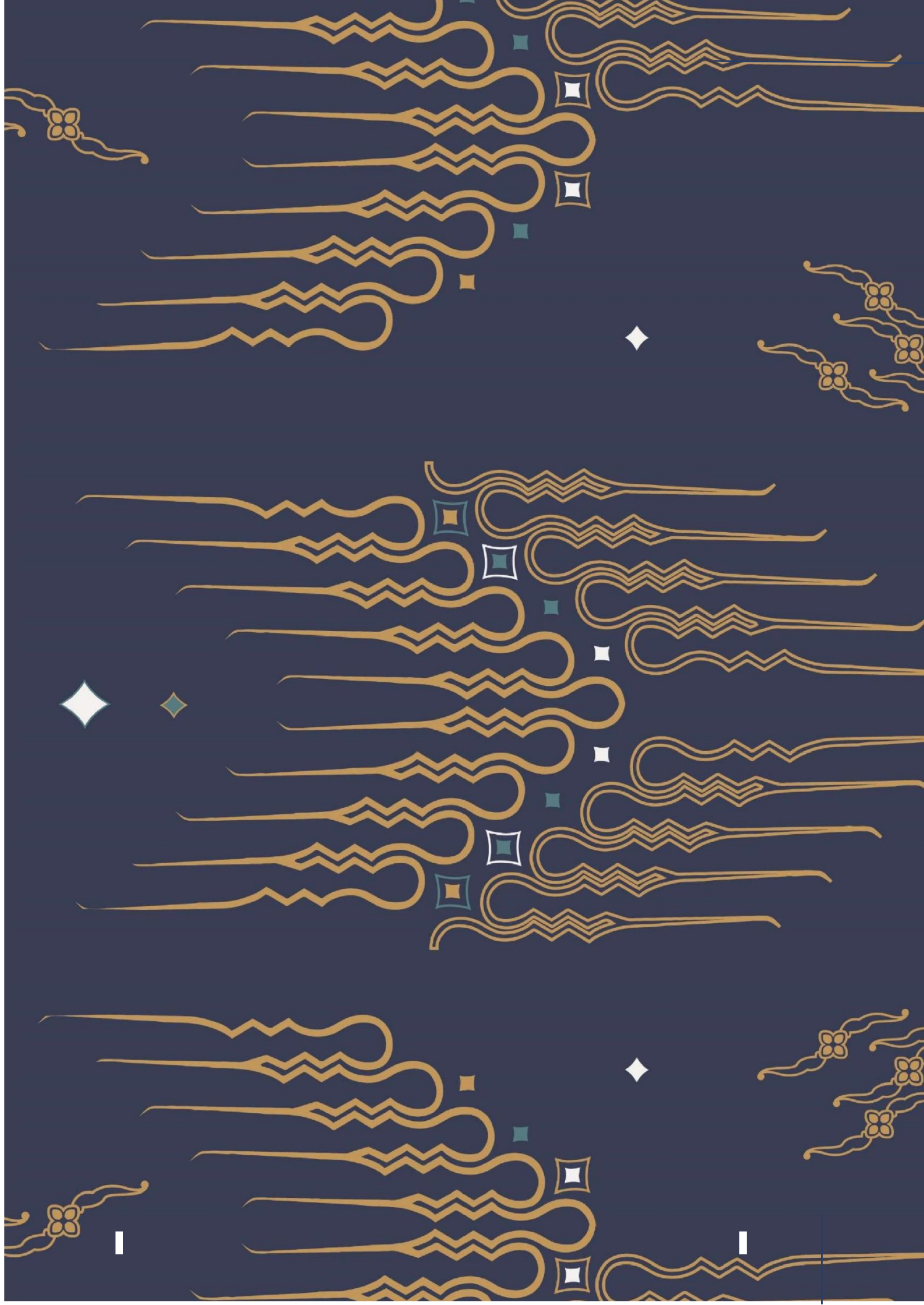
Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Banjar, 20 Oktober 2023

Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan



ZULMARDI, A.TD, M.M



Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu:

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 2 (dua) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat;
2. Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2023, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Program (IKP), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Program (SP), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Triwulan III tahun 2023, terdapat 0 (nol) Sasaran Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SP \geq 100\%$) dan 5 (lima) Sasaran Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$).

Dari 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Program (IKP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Triwulan III tahun 2023, terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 75% (target 100%) tercapai 75% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 75% (target 100%) tercapai 75%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 8 lokasi (target 8 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 67,5% (target 90%) tercapai 75%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 75% (target 100%) tercapai 75%;
7. Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
8. Jumlah Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 37,44% (target 50%) tercapai 125%;
9. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1200 orang (target 1200) tercapai 100%;

10. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 67,5% (target 90%) tercapai 75%;
11. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
12. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 63,75 (target senilai 85) tercapai 75%;
13. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 60 (target senilai 80) tercapai 75%;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program adalah sebesar 82,55%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitaskinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
Kata Sambutan	iii
Ringkasan Eksekutif	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.3 Sumber Daya Manusia	4
I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	5
I.5 Sistematika Laporan	6
I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	10
I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	12
I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja	15
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	17
II.1TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	17
II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional.....	22
a.1. Definisi Indikator Kinerja	22
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	23
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	24
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	26
IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	26
a.1. Definisi Indikator Kinerja	26
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023.	28
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	28
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	30
IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.....	30
a.1. Definisi Indikator Kinerja	30
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	30
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	31
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	32
IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	33

a.1.	Definisi Indikator Kinerja	33
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	33
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	34
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	35
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	36
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	36
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	36
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	37
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	37
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	39
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	40
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	40
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	40
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	41
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	43
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	43
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	43
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	44
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	45
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	46
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	46
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	46
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	47
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	47
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	49
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	49
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	49
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	50
a.3.	Analisa Keberhasila dan /Kegagalan	50
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	51
IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	52
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	52
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	52
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	53
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	55
IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	55

a.1.	Definisi Indikator Kinerja	55
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	55
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	56
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	57
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	58
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	58
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	58
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	59
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	60
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	61
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	61
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023	61
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	62
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	63
II.3	Realisasi Anggaran	64
II.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2023	64
II.3.1.1	Pagu Anggaran	64
II.3.1.2	Revisi Anggaran Tahun 2023	66
II.3.1.3.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023	70
II.3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2023	72
II.3.2.1	Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023	72
II.3.2.2	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023	74
II.3.2.3	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023	75
II.3.2.4.	Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja	77
II.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
II.5	Hambatan dan Kendala	81
BAB III	PENUTUP	82
III.1	Ringkasan Capaian	82
III.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	84

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas II Kalsel.....	4
Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 -2024.....	10
Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan 2023.....	12
Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	21
Tabel II.2 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023.....	64
Tabel II.3 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023.....	64
Tabel II.4 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2023.....	66
Tabel II.5 Rincian Revisi Per Jenis Belanja T.A. 2023.....	66
Tabel II.6 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2023.....	67
Tabel II.7 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A 20.....	68
Tabel II.8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023 Triwulan III.....	70
Tabel II.9 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2023	72
Tabel II.10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja triwulan III Tahun 2023.....	74
Tabel II.11 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I-III 2023.....	75
Tabel II.12 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023.....	77
Tabel II.13 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023.....	77
Tabel II.14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2023.....	78
Tabel II.15 Efisiensi anggaran.....	79
Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.....4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Kelas II Kalsel 2023
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha BPTD Kelas II Kalsel 2023
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalsel 2023
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalsel 2023
Lampiran Perjanjian Kinerja Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas II Kalsel 2023
Lampiran Rencana Aksi 2023
Lampiran Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Kelas II Kalsel 2023
Lampiran Revisi I Rencana Aksi 2023
Data Dukung per Indikator Kinerja Kegiatan

Bab I

Pendahuluan



I.1
LATAR
BELAKANG

I.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

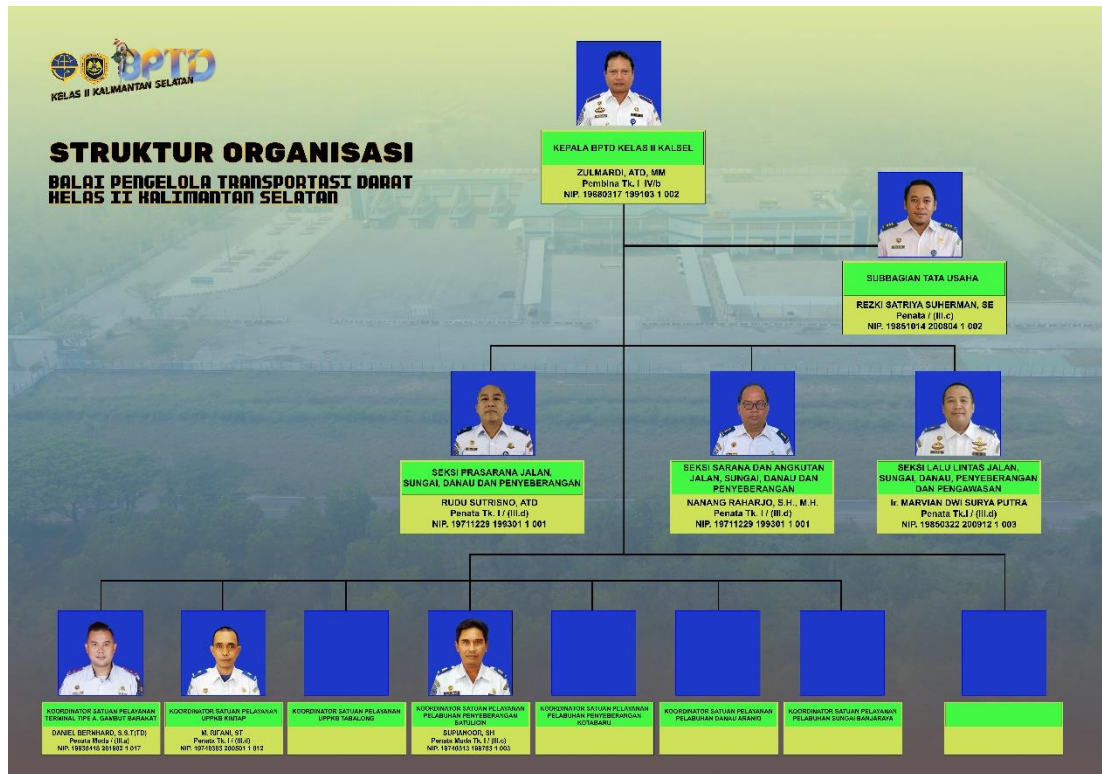
Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:
a. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan menaungi sebanyak 166 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:
SDM PNS BPTD sebanyak : 56 orang
SDM PPNPN BPTD Sebanyak : 110

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas II Kalsel

NO	NAMA	PNS	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II KALSEL	37	48	85
2	SATPEL TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT, KAB. BANJAR	8	39	47
3	SATPEL UPPKB KINTAP	6	14	20
4	SATPEL UPPKB TABALONG	-	-	-
5	SATPEL PELABUHAN PENYEBERANGAN BATULICIN	5	9	14
6	SATPEL PELABUHAN PENYEBERANGAN KOTABARU	-	-	-
7	SATPEL PELABUHAN DANAU ARANIO	-	-	-
8	SATPEL PELABUHAN SUNGAI BANJARAYA	-	-	-
JUMLAH		56	110	166

I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam TransportasiPenyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah:

1. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
2. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
3. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
4. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
5. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja 2023

BAB II Capaian Kinerja

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

II.2.1 SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi

A.1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

- A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

- A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

- A.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat

B.1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan transportasi darat

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun2023
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan Transportasi Jalan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun2023
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.4. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- C.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun2023
- C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.5. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- C.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun2023
- C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun2023
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

E.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- E.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun2023
- E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2 Realisasi Anggaran

II.2.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Revisi Anggaran Tahun 2023
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2023

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.2 Ringkasan Capaian

III.3 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023;
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

Tabel I. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2020-2024	
1	SK1 Konektivitas Transportasi darat dan Keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2020-2024		
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8	
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal tipe-A	%	90
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	39
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	3400
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80

1.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	8
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200

		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

1.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 138.192.830.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100

		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	8	
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 23.273.605.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 43.202.563.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 56.795.172.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.481.672.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.038.173.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 4.384.645.000

I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja

Dengan terjadinya perubahan nomenklatur Ortaker sesuai PM 6 Tahun 2023 maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian kinerja pada bulan Agustus berdasarkan nomenklatur baru BPTD Kelas II Kalimantan Selatan dan penyesuaian anggaran berdasarkan Revisi DIPA ke-07 tanggal 12 Juli 2023.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.139.827.456.000,-

Tabel I. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 23.273.605.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 43.202.563.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 56.795.172.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.481.672.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.038.173.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.019.271.000

BAB II CAPAIAN KINERJA

II.1TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasitersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					62,5%			75,74%			88,82%
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	25	25%	100	49,16	49,16%	100	75	75%
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25	25%	100	53,82	53,82%	100	80,29	80,29%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	8	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat					25%			50%			75%
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90	22,5	25%	90	45	50%	90	67,5	75%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	25	25%	100	50	50%	100	75	75%
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat					50%			80%			100%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	25	25%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	50	12,48	175%	50	25	150%	50	37,44	125%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	1200	1200	0	0%	1200	0	0%	1200	1200	100%
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	90	22,5	25%	90	45	50%	90	67,5	75%
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0,25	25%	1	1	100%	1	1	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					25%			50%			75%
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	85	85	21,25	25%	85	42,5	50%	85	63,75	75%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					25%			50%			75%
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80	80	20	25%	80	40	50%	80	60	75%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						37,5%			61,15%			82,76%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						46,15%			69,46%			88,87%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						3			5			6
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						11			8			7

Selama tahun 2023, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 13 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Penjelasan capaian IKP untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe - A dan terminal barang yang beroperasi
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

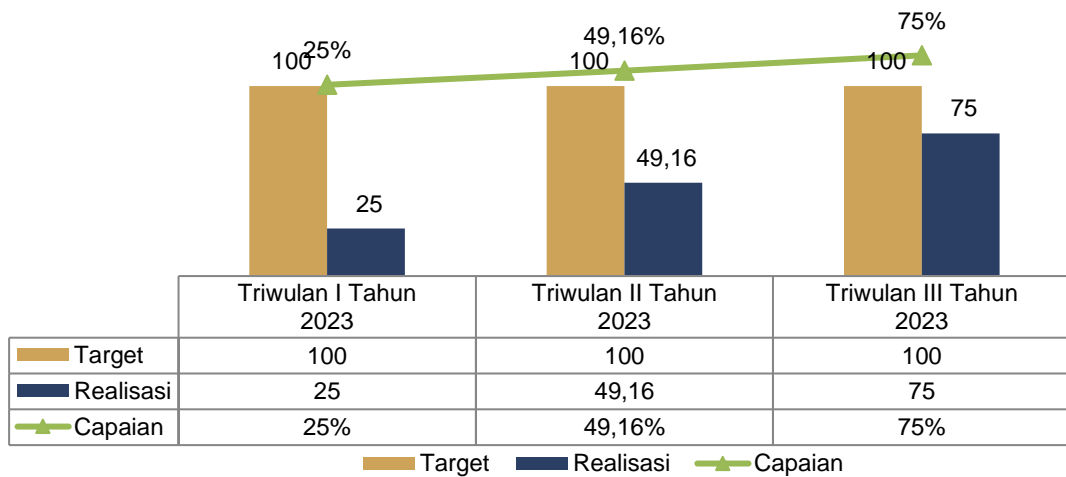
Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan

Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan III tahun 2023 sebesar 75 % jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 75%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1**. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional.



Gambar III.1. Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 8613 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023, sebanyak 5 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &\text{Persentase pelaksanaan} \\ &\text{keperintisan} \\ &\text{angkutan jalan nasional} \end{aligned} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rincian Trayek	volume	Satuan	Total Capaian s.d Sep
1	Terminal Pelaihari - Pantai Takisung - Tabanio	360	Rit	270
2	Terminal Gambut Barakat - Loksado	720	Rit	540
3	Terminal Pelaihari - Jorong	720	Rit	540
4	Terminal Gambut Barakat - Marabahan	720	Rit	532
5	Terminal Pelaihari Gambut Barakat - Pantai Batakan	720	Rit	539
Total		3.240	Rit	2.421

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{2.421}{3.240} \times 100\% = 74.72\% = 75\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{75}{100} \times 100\% = 75\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 4.206.903.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp 2.784.497.818 atau mencapai 66,19%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 1 (satu) Satuan Pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi yaitu Terminal Tipe-A Gambut Barakat dan tidak memiliki Terminal Barang yang Beroperasi.

Terminal Tipe-A Gambut Barakat Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lahan 4,8 ha dan luas Bangunan Terminal sebesar 3.417 M². Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan (ANGKOT).

Terminal Tipe-A Gambut Barakat memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Fasilitas Utama | - Fasilitas Penunjang |
| a. Jalur Keberangkatan | a. Klinik |
| b. Jalur Kedatangan | b. Fasilitas Keamanan |
| c. Ruang Tunggu penumpang | c. Gerai ATM |
| d. Area Parkir Penjemput / Pengantar | d. Endapan Bus |
| e. Perlengkapan Jalan | e. Kios/Kantin |
| f. Loket Penjualan Tiket | f. Masjid |
| g. Pusat Informasi | g. Wifi |
| h. Media Informasi | h. Tempat bermain anak |
| i. Gedung Utama / Kantor Terminal | |
| j. Toilet Umum | |
| k. Gudang | |

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Gambut Barakat terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah / turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

a. Aspek Pelayanan Publik

Petugas memberikan informasi arah, lokasi terkait situasi di terminal. Mengarahkan bus sebagai petugas pengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada sopir dan penumpang.

b. Aspek Keamanan

Petugas ditempatkan di beberapa pos pemantauan situasi di terminal upaya menjaga keamanan disekitar terminal, melakukan rampcheck untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum sebelum berangkat, dan sistem di terminal sudah dilengkapi dengan CCTV untuk keamanan pengguna terminal.

c. Aspek Kenyamanan

Sudah tersedia fasilitas-fasilitas penunjang di terminal seperti toilet, ruang tunggu, tempat ibadah, tempat bermain anak, kantin / kios dan klinik agar kenyamanan pengguna terminal tetap di utamakan.

d. Aspek Sosial

Sifat dan sikap terhadap masyarakat sebagai pengguna terminal harus diterapkan oleh setiap petugas, pelayanan yang ramah dan sopan oleh petugas Terminal Tipe-A Gambut Barakat agar terjalin hubungan yang harmonis.

e. Aspek Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas utama dan penunjang sudah tersedia di Terminal Tipe-A Gambut Barakat, meskipun beberapa kondisi fasilitas ada yang rusak ringan.

f. Aspek Inovasi dalam Bekerja

Setiap petugas terminal disaat bertugas sudah memiliki inovasi-inovasi dalam bekerja, seperti aktif dalam memberikan informasi terkait keselamatan dalam penggunaan transportasi umum juga informasi keberangkatan maupun kedatangan kendaraan dan penumpang, dan mengupload beberapa kegiatan-kegiatan terminal di media sosial.

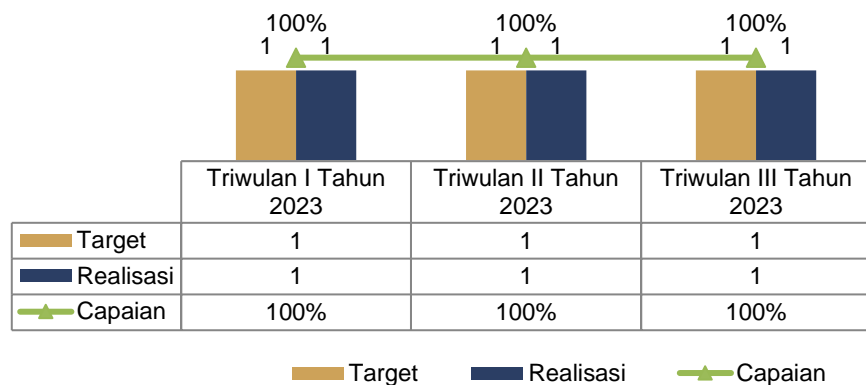
Capaian kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Capaian kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Triwulan III tahun 2023 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.



Gambar III.3. Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada tahun 2023 di Terminal tipe-A Gambut Barakat Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

• **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 antara lain yaitu :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum
2. Informasi tentang pelayanan diterminal tersampaikan kepada masyarakat
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor

- **Faktor Kegagalan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 antara lain yaitu :

1. Kebersihan diterminal masih kurang maksimal
2. Lokasi jauh dari jalan utama
3. Fasilitas umum pada Terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 2.224.628.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 1.686.253.519 atau mencapai 75,8%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
3. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
4. Meningkatkan pendapatan PNBPN di Terminal Tipe-A.

IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

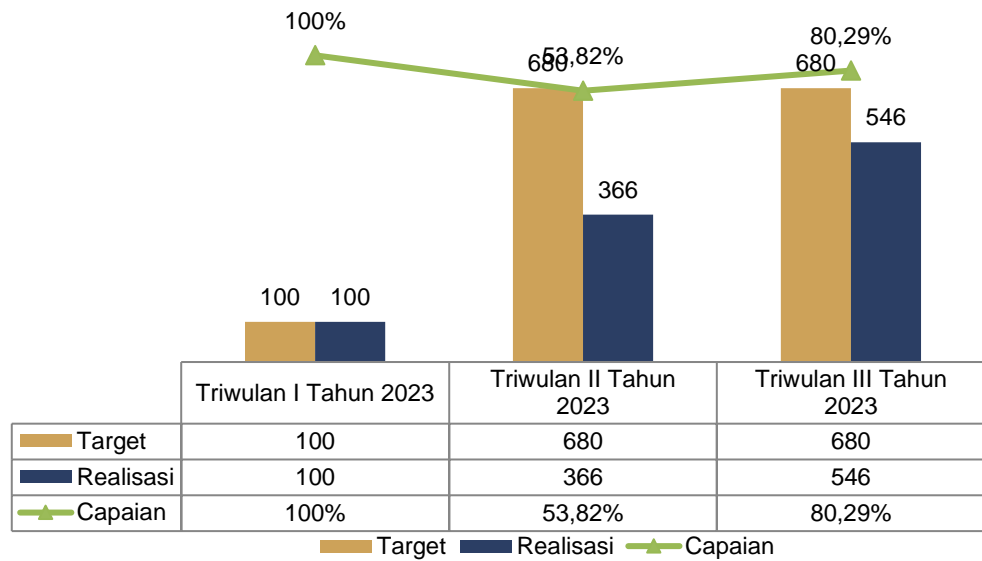
Persentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip Penyeberangan yang terealisasi Dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Januari – Juni (Trip)}}{\text{Target Setahun (Trip)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan III tahun 2023 sebesar 546 trip jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 680 trip maka capaian kinerja mencapai 80,29%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.**



Gambar III.5. Grafik Capaian IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9496 Tahun 2022 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Tahun Anggaran 2023 maka ditetapkan untuk pengawasan dan pelayanan angkutan perintis Pelabuhan Penyeberangan oleh BPTD Kelas II Kalimantan Selatan sebanyak 1 trayek yaitu Penyeberangan Lintas Pulau Laut Timur – Pulau Sebuku.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir
3. Kepastian jam operasional Keperintisan Angkutan Penyeberangan
4. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat Pulau Sebuku.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut.
2. Jadwal Oprasional tidak Terlalu banyak.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

**Persentase pelaksanaan
pelayanan keperintisan angkutan
penyeberangan**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 adalah 80,29%. Dimana persentase capaian merupakan hasil realisasi dibagi target. Yang mana nilai pada realisasi adalah 546 dibagi nilai target adalah 680 dan dikali 100 persen. Artinya Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 berhasil mencapai target dengan sempurna.

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{546}{680} \times 100\% = 80,29\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80,29}{100} \times 100\% = 80,29\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan memiliki target keuangan senilai Rp. 4.066.702.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp 1.486.994.935,- atau mencapai 36,57%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat

IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;

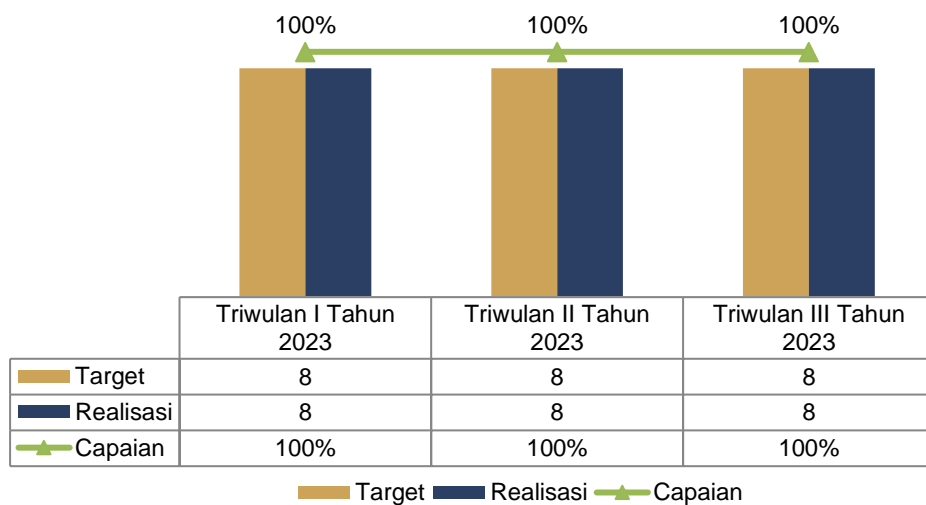
Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan III tahun 2023 sebesar 8 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 8 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.6**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar III.6. Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan terdata 2 (dua) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2022 ada 8 (delapan) Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	Pelabuhan Penyeberangan	Dasar Hukum
1.	Batulicin – Tanjung Serdang (ASDP)	PM 154 Tahun 2018
2.	Tanjung Serdang	PM 154 Tahun 2018
3.	Pulau Laut Timur	DIPA 2022
4.	Stagen	DIPA 2022
5.	Sebuku	DIPA 2022
6.	Tanjung Batu	DIPA 2022
7.	Tarjun	DIPA 2022
8.	Sigam	DIPA 2022

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 2 terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Namun pada Tahun berjalan ada 6 Pelabuhan Penyeberangan yang belum termasuk pada Dasar hukum sesuai PM 154 Tahun 2018 yang mana juga masuk dalam pengawasan Balai Pengelola Transportasi darat Kelas II Kalimantan Selatan sehingga terkait hal ini kami lakukan koordinasi dengan Direktur TSDP untuk mengajukan 6 Pelabuhan penyeberangan kedalam perubahan PM.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada
2. Keadaan Alam Seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar kantor
3. masih perlu peningkatan fasilitas kantor

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

**Jumlah Pelabuhan SDP
yang beroperasi**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{8}{8} \times 100\% = 100$$

- **Capaian kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 sebesar 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil mencapai target sempurna atau mampu memenuhi target.

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.040.196.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp 755.868.030 atau mencapai 72,67%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhiny persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan serta dapat memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan jalan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan.

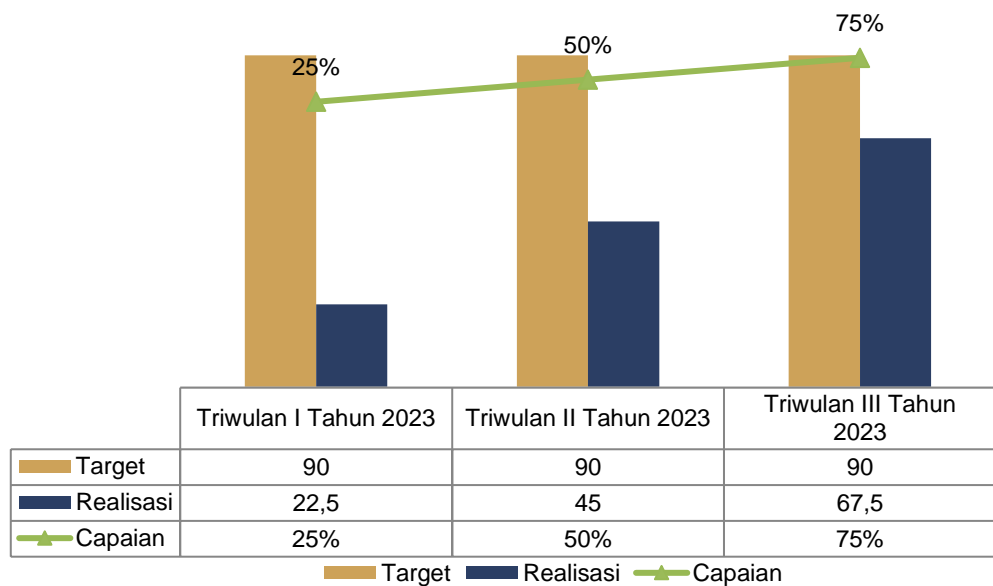
Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan III tahun 2023 sebesar 67,5 jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 75%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7**. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.



Gambar III.7. Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum**

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan jalan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan.

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2022 tercapai 100% Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2022.

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja SPM di Terminal Tipe-A antara lain yaitu:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan Transportasi Darat.
2. Terlaksananya Kegiatan SPM setiap harinya di Terminal Gambut Tipe A dengan mensosialisasi kepada penumpang tata cara pengisian melalui scan barcode.
3. Terwujudnya kenyamanan dan keamanan serta kebersihan lingkungan Terminal Gambut Tipe A dengan pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan oleh tim kebersihan dan keamanan secara berkala dengan jadwal tersusun.

- **Faktor Kegagalan**

1. Indikator Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A terkendala oleh cuaca seperti musim penghujan dimana menyebabkan banjir beberapa tempat sehingga akses keluar masuk terminal sedikit terkendala karena air hujan.
2. Kurangnya inisiatif penumpang untuk mengisi Kuisisioner terkait pelayanan SPM di Terminal Tipe A.
3. Kurangnya inisiatif penumpang untuk saling menjaga kebersihan dilingkungan Terminal Tipe A.

- **Realisasi Kinerja**

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2023 tercapai 50% dengan melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimum (SPM) angkutan jalan;
2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Pelaksanaan} \\ &\text{Standar Pelayanan Minimum} \\ &\text{(SPM) di Terminal Tipe-A} \end{aligned} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{90} \times 100\% = 75\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 2.224.628.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 1.686.253.519 atau mencapai 75,8%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas Terminal Tipe-A;
2. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban Terminal Tipe-A;
3. Melaksanakan Pelayanan di Terminal Tipe-A sesuai dengan SPM yang ada;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

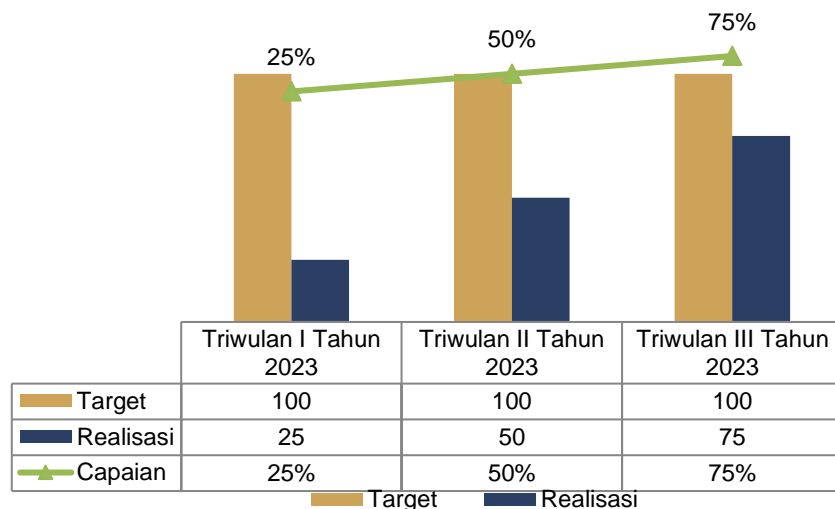
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Triwulan III tahun 2023 sebesar 75 jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 75%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9**. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023.



Gambar III.9. Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP berdasarkan PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada angkutan penyeberangan di pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan	Uraian
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesetaraan
	Aspek Keteraturan

- **Faktor keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan

perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Kegiatan :

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

- **Faktor Kegagalan**

1. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP mengalami kendala bilamana cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan.
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimensi Over Load*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

- **Realisasi kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 50%. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yaitu :

**Persentase pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimum
(SPM) di pelabuhan SDP**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{75}{100} \times 100\% = 75\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 yaitu senilai 1.040.196.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp 755.868.030 atau mencapai 72,67%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
4. Melaksanakan Pelayanan di Pelabuhan SDP sesuai dengan SPM yang ada;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP.

Sasaran Strategis 3: SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :

- 1) Alat Penerangan Jalan;
- 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
- 3) Marka Jalan;
- 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 5) Paku Jalan;
- 6) Rambu Lalu Lintas;
- 7) Rambu Tiang Gawang;

- 8) Rambu Tiang F;
- 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
- 10) Pagar Pengaman Jalan;

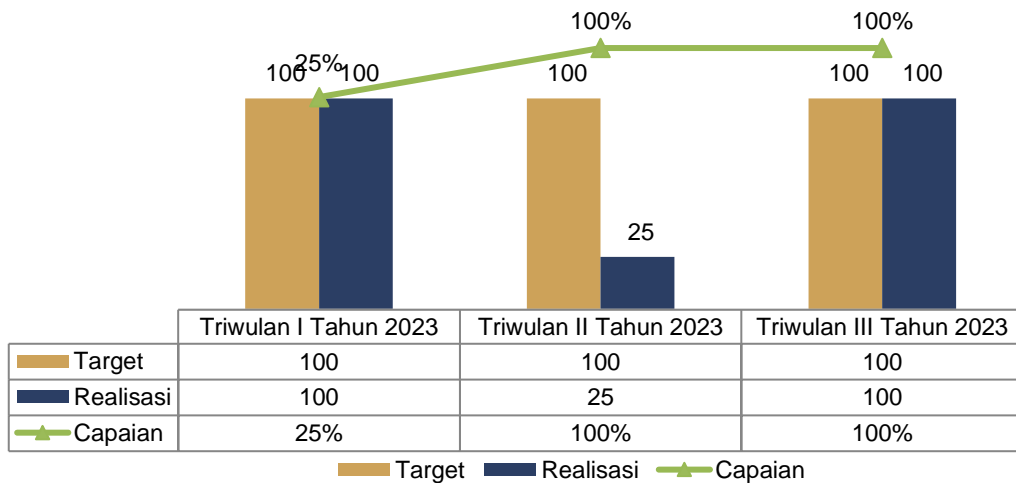
Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Triwulan III tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.



Gambar III.10. Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal berdasarkan Perjiden SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki realisasi 100 persen. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 20.738.676.000,- dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 18.271.364.195 atau mencapai 88,1%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

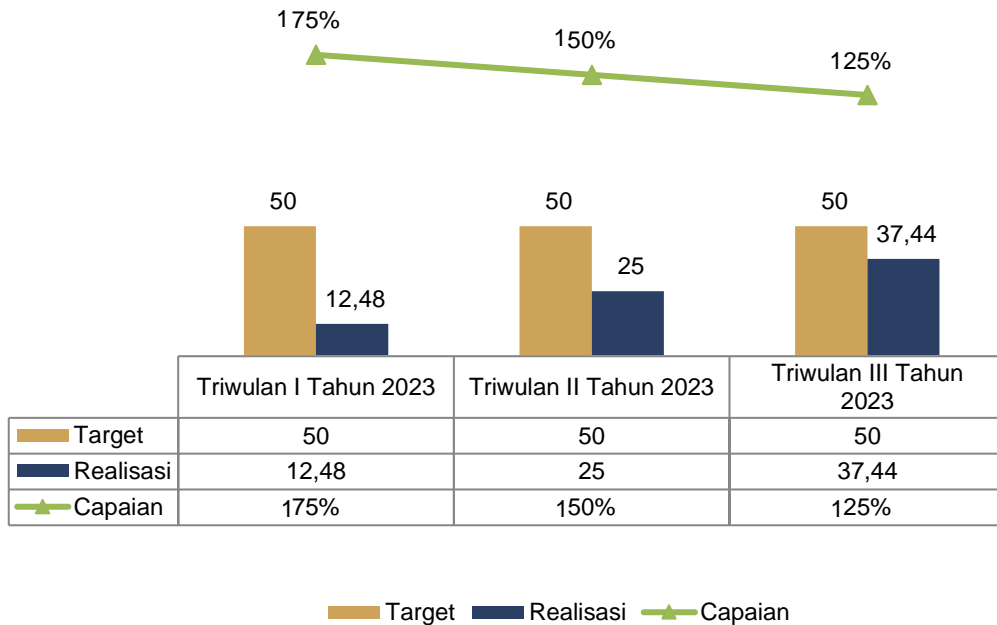
- a. Tata cara pemuatan barang;
- b. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. Dokumen Angkutan Barang;
- e. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. Jenis barang yang diangkut, berat angkutandan asal tujuan.

Untuk menghitung Indikator Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan III tahun 2023 sebesar 37,44% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 125%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Gambar III.10. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki target 50 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) dari 0 menjadi target 50% pada Revisi I PK 2023.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Para sopir dan armada angkutan bersedia dengan sadar diri memasuki wilayah UPPKB
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi
3. Para sopir dan armada angkutan tertib administrasi maupun muatan barang

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

- a. Para sopir dan armada angkutan susah untuk diarahkan memasuki wilayah UPPKB
- b. Kurangnya kesadaran Para sopir dan armada angkutan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku
- c. Para sopir dan armada angkutan tidak tertib dalam administrasi maupun kelebihan muatan barang

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki realisasi 125 persen. Untuk menghitung Indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(50 - (37,44 - 50))}{50} \times 100\% = 125\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.376.548.000,- dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 956.886.293 atau mencapai 69,51%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan Zero ODOL;
2. Mewujudkan armada angkutan barang yang berkeselamatan;
3. Dapat mengurangi kerusakan jalan akibat beban muatan angkutan barang.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan himbauan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada para masyarakat melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan.

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

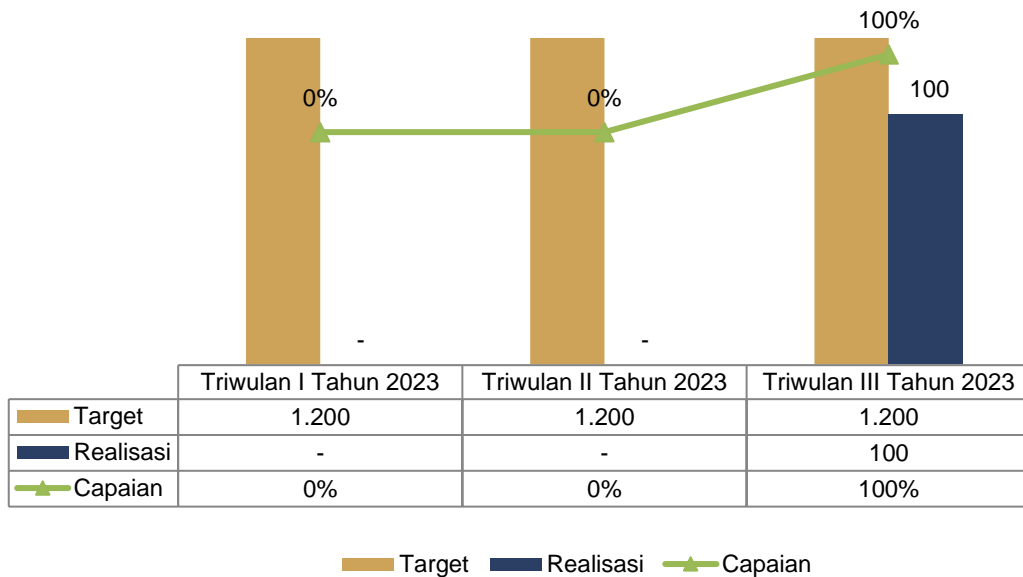
Untuk menghitung Indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

**Jumlah Masyarakat Yang
Tersosialisasi Tentang
Keselamatan Transportasi Jalan**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan III tahun 2023 sebesar 1200% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 1200 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.14**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar III.14. Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.3. Analisa Keberhasila dan /Kegagalan

• **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b “Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

• **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1200 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tingginya pengguna Jasa Angkutan Umum
2. Petugas Terminal Tipe A Selalu melakukan penyampaian informasi tentang keselamatan kepada penumpang disaat Bus akan berangkat
3. Petugas Menyampaikan informasi dengan Jelas dan singkat

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan karena penumpang tidak memperhatikan
2. Kemungkinan Petugas tidak ada di tempat saat Bus akan berangkat
3. Petugas yang menyampaikan informasi kurang kompeten.

- **Realisasi kinerja**

Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2023 belum terealisasi karena pada hal ny sosialisasi pekan keselamatan jalan akan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama dibulan september.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1200}{1200} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 300.000.000,- dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 295.975.950,- atau mencapai 98,66%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkeselamatan
2. Menciptakan rasa nyaman bagi penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum
3. Mewujudkan bentuk tanggungjawab dan kepedulian insan perhubungan

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

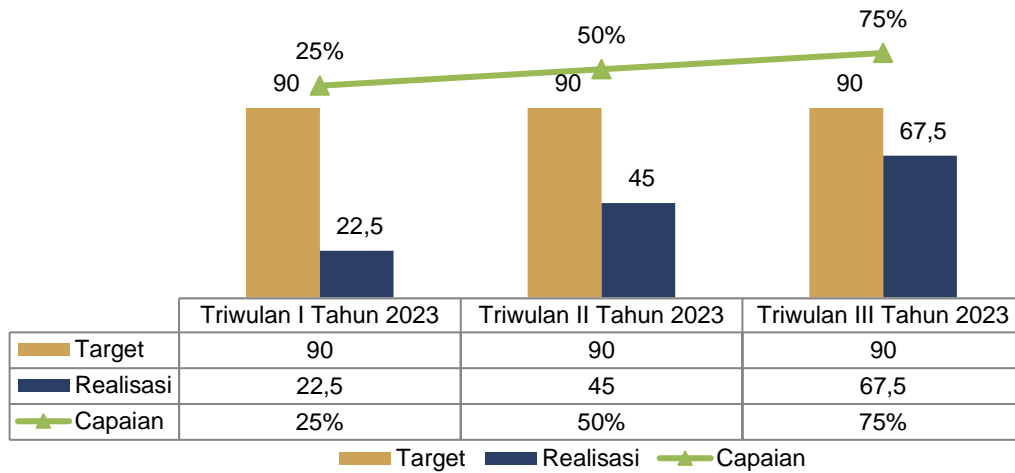
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

$$\text{Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Triwulan III tahun 2023 sebesar 67,5% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 75%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023.



Gambar III.16. Grafik Capaian IKK 7a Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan, Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota yang ada di Kalsel
2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi
3. Peralatan yang akan di uji sudah terstandar

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Tidak memiliki gedung uji
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji
3. ketidak mampuan Dishub Kab/Kota untuk memenuhi Fasilitas dan Alat uji kendaraan bermotor.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki realisasi 75 persen. Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pelaksanaan} \\ \text{standarisasi pengujian berkala} \\ \text{kendaraan bermotor} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 merupakan kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di 13 Kab/Kota provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada Triwulan III ini sudah melakukan kegiatan di 4 PKB yang telah terstandarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{90} = 75\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 120.000.000,- dengan realisasi Triwulan III Tahun 2023 Rp. 19.335.500 atau mencapai 16,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang di persyaratkan.
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telah ditentukan.
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan.

IKK7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

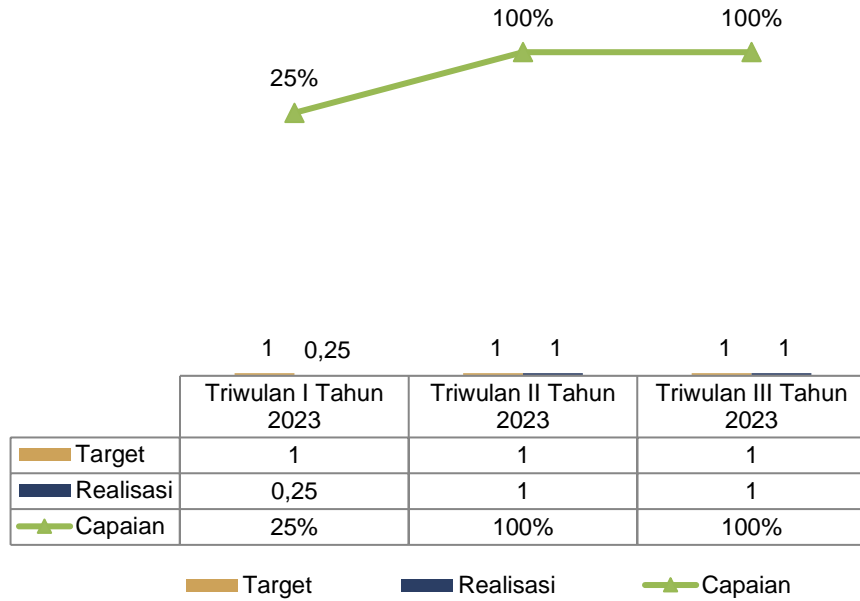
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP dan membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP serta melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Triwulan III tahun 2023 sebesar 1 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023.



Gambar III.17. Grafik Capaian IKK 7b Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, maka telah ditetapkan sebagaidasar pemasangan rambu sungai.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan

- **Realisasi Kinerja**

Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP untuk di tahun 2023 sudah dilaksanakan mencapai 100% untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu sungai sebanyak 100 unit pada DAS Barito. Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.500.500.000 dengan realisasi hingga akhir Tahun 2023 Rp. 1.450.343.750 atau mencapai 96,66%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan

Sasaran Strategis 4: SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Program 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

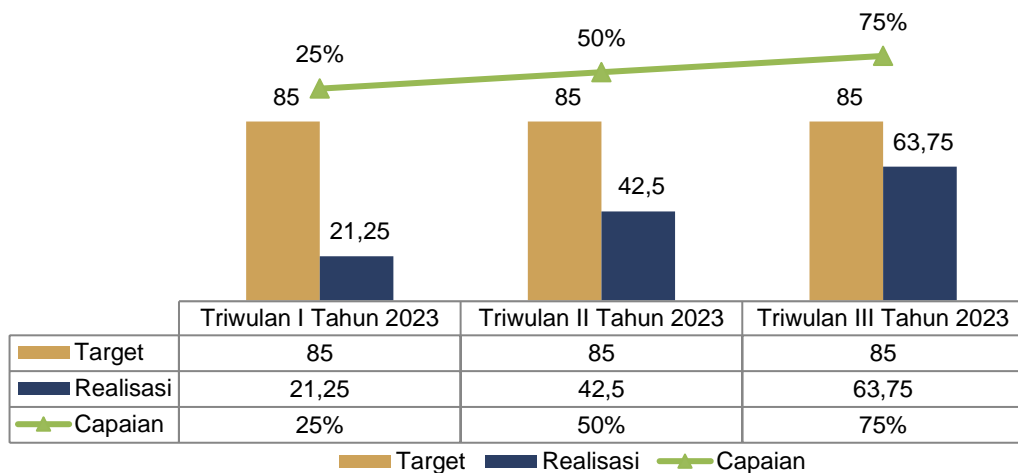
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

<p>Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat</p>	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
---	---

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan III tahun 2023 senilai 63,75 . Jika dibandingkan dengan target PK 2023 senilai 85 maka capaian kinerja mencapai 75% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 18**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat



Gambar III 18. Grafik Capaian IKK 5.1 Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target senilai 85 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2023 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyusunan bahan RKA
2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai
4. Pengiriman Pegawai Diklat
5. Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsolidasi
6. Monwas Hubdat
7. Monwas sarpras
8. Kalibrasi alat uji;
9. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;
10. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Pengawasan Gakum;
12. Monev Angkutan Komersil dan Perintis
13. Monitoring alur sungai (DAS Barito dan danau Riam Kanan)
14. Monitoring Pelayanan TSDP
15. Pendataan dan Pengukuran Kapal Sungai dan Danau
16. Ramphcheck Kapal Penyeberangan
17. Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Kapal
18. Monev Sarpras Ditjen Hubdat

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait
3. SDM yang bersolidaritas

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran
2. kurangnya SDM yang ada

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{63,75}{85} \times 100\% = 75\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2023 yaitu senilai Rp 5.481.672.000,- dan sampai dengan Triwulan III 2023 realisasi anggaran senilai Rp 3.682.769.907,- atau sebesar 67,18%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dimasa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah yang masuk dan keluar serta mengoreksi naskahdinas agar sesuai aturan;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan;
4. Dapat menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Program 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

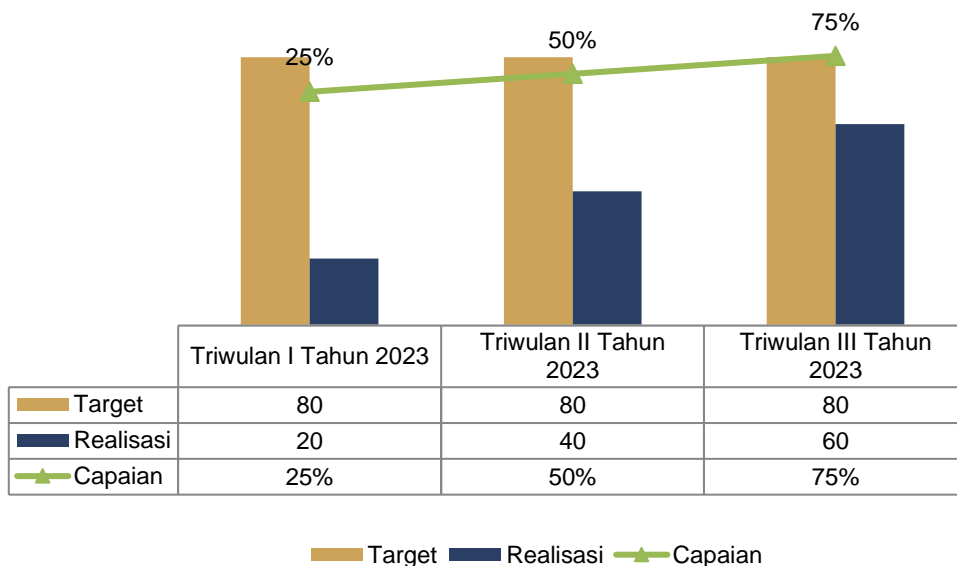
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III tahun 2023 sebesar 60. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 75%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19**. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar III.19. Grafik Capaian IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target 80 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Managemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia.(SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

Adapun beberapa pelayananperkantoran yang telah diserap, yaitu :

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Honorarium Satuan Kerja
3. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP
4. Gaji dan Tunjangan Pegawai

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran DitjenPerhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten
2. Kegiatan yang ada di Kantor sudah terjadwal secara rutin
3. Evaluasi setiap bulan

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada
2. Pengurangan Anggaran

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{60}{80} \times 100\% = 75\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 5.038.173.000,- dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 4.132.715.093,- atau mencapai 82,34%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Dapat Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi dan misi sasaran yang telah ditetapkan;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan.

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023

II.3.1.1 Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp 138.192.830.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2. Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

RM	Rp.	67.589.858.000	48,90%
PNBP	Rp.	41.438.239.000	29,98%
SBSN	Rp.	29.164.733.000	21,10%
Total	Rp.	138.192.830.000	100,00%

Tabel II.3. Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp.	4.384.645.000	3,17%
Belanja Barang	Rp.	54.705.995.000	39,58%
Belanja Modal	Rp.	79.102.190.000	57,24%
Total	Rp.	138.192.830.000	100,00%

Meskipun Pagu BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat 8 (delapan) kali revisi sehingga mengalami perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 tetap sebesar **Rp. 139.827.456.000,-**.

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Kementerian Keuangan tanggal 30 November 2022 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (DIPA awal);
- b. Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 Desember 2022 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 1);

- c. Surat Kementerian Keuangan tanggal 14 Februari 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 2);
- d. Surat Kementerian Keuangan tanggal 17 Maret 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 3);
- e. Surat Kementerian Keuangan tanggal 14 April 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 4);
- f. Surat Kementerian Keuangan tanggal 6 Juni 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 5);
- g. Surat Kementerian Keuangan tanggal 6 Juli 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 6);
- h. Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Juli 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 7);
- i. Surat Kementerian Keuangan tanggal 13 September 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2023 (Revisi 8).

II.3.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 8 (delapan) kali revisi DIPA , maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.4. Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	67.589.858.000	41.438.239.000	29.164.733.000	138.192.830.000
REVISI KE-1	67.589.858.000	41.438.239.000	29.164.733.000	138.192.830.000
REVISI KE-2	67.589.858.000	41.438.239.000	29.164.733.000	138.192.830.000
REVISI KE-3	67.589.858.000	41.438.239.000	29.164.733.000	138.192.830.000
REVISI KE-4	67.589.858.000	41.438.239.000	29.164.733.000	138.192.830.000
REVISI KE-5	67.589.858.000	41.438.239.000	29.164.733.000	138.192.830.000
REVISI KE-6	69.224.484.000	41.438.239.000	29.164.733.000	139.827.456.000
REVISI KE-7	69.224.484.000	41.438.239.000	29.164.733.000	139.827.456.000
REVISI KE-8	69.224.484.000	41.438.239.000	29.164.733.000	139.827.456.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Tabel II.5. Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2023

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	4.384.645.000	54.705.995.000	79.102.190.000	138.192.830.000
REVISI KE-1	4.384.645.000	54.705.995.000	79.102.190.000	138.192.830.000
REVISI KE-2	4.384.645.000	54.705.995.000	79.102.190.000	138.192.830.000
REVISI KE-3	4.384.645.000	54.705.995.000	79.102.190.000	138.192.830.000
REVISI KE-4	4.384.645.000	54.705.995.000	79.102.190.000	138.192.830.000
REVISI KE-5	4.384.645.000	54.705.995.000	79.102.190.000	138.192.830.000
REVISI KE-6	6.019.271.000	54.705.995.000	79.102.190.000	139.827.456.000
REVISI KE-7	6.019.271.000	54.705.995.000	79.102.190.000	139.827.456.000
REVISI KE-8	6.019.271.000	54.705.995.000	79.102.190.000	139.827.456.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Tabel II.6. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2023

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III
Belanja Pegawai	4.384.645.000	-	4.384.645.000	-	4.384.645.000	1.634.626.000	6,019,271,000
Belanja Barang	54.705.995.000	-	54.705.995.000	-	54.705.995.000	-	54.705.995.000
· RM	54.705.995.000	-	54.705.995.000	-	54.705.995.000		54.705.995.000
· PNPB	-	-	-	-	-		-
Belanja Modal	79.102.190.000	-	79.102.190.000	-	79.102.190.000	-	79.102.190.000
· RM	8.499.218.000	-	36.131.051.000	-	36.131.051.000		36.131.051.000
· PNPB	41.438.239.000	-	41.438.239.000	-	41.438.239.000		41.438.239.000
· SBSN	29.164.733.000	-	29.164.733.000	-	29.164.733.000		29.164.733.000
TOTAL	138.192.830.000	-	138.192.830.000	-	138.192.830.000	1.634.626.000	139.827.456.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.7. Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
022.03	BPTD Kalsel	138.192.830.000	138.192.830.000	11.900.079.121	8,61	138.192.830.000	38.332.887.117	27,74	139.827.456.000	77.533.127.871	55,45
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	128.753.012.000	128.753.012.000	8.008.577.700	6,22	128.753.012.000	31.846.376.582	24,73	128.753.012.000	68.640.408.208	53,31
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	23.273.605.000	23.273.605.000	1.031.536.754	4,43	23.273.605.000	4.503.608.654	19,35	23.273.605.000	14.747.252.075	63,36
4638	Pelayanan Transportasi Darat	43.202.563.000	43.202.563.000	895.229.024	2,07	43.202.563.000	11.462.761.163	26,53	43.202.563.000	14.936.789.289	34,57
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	56.795.172.000	56.795.172.000	4.849.959.153	8,54	56.795.172.000	13.580.691.712	23,91	56.795.172.000	35.273.596.937	62,11
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.481.672.000	5.481.672.000	1.231.852.764	22,47	5.481.672.000	2.299.315.053	41,95	5.481.672.000	3.682.769.907	67,18
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	9.439.818.000	9.439.818.000	3.891.501.421	41,22	9.439.818.000	6.486.505.535	68,71	11.074.444.000	8.892.719.663	80,3

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN II	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi Dan Teknologi Transportasi Darat	17.000.000	-	-	0	17.000.000	17.000.000	100	17.000.000	17.000.000	100
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.038.173.000	5.038.173.000	1.842.292.396	36,57	5.038.173.000	3.140.224.076	62,33	5.038.173.000	4.032.280.910	80,03
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	4.384.645.000	4.564.096.000	2.049.205.025	46,74	4.384.645.000	3.329.281.459	75,93	4.384.645.000	4.843.438753	80,47

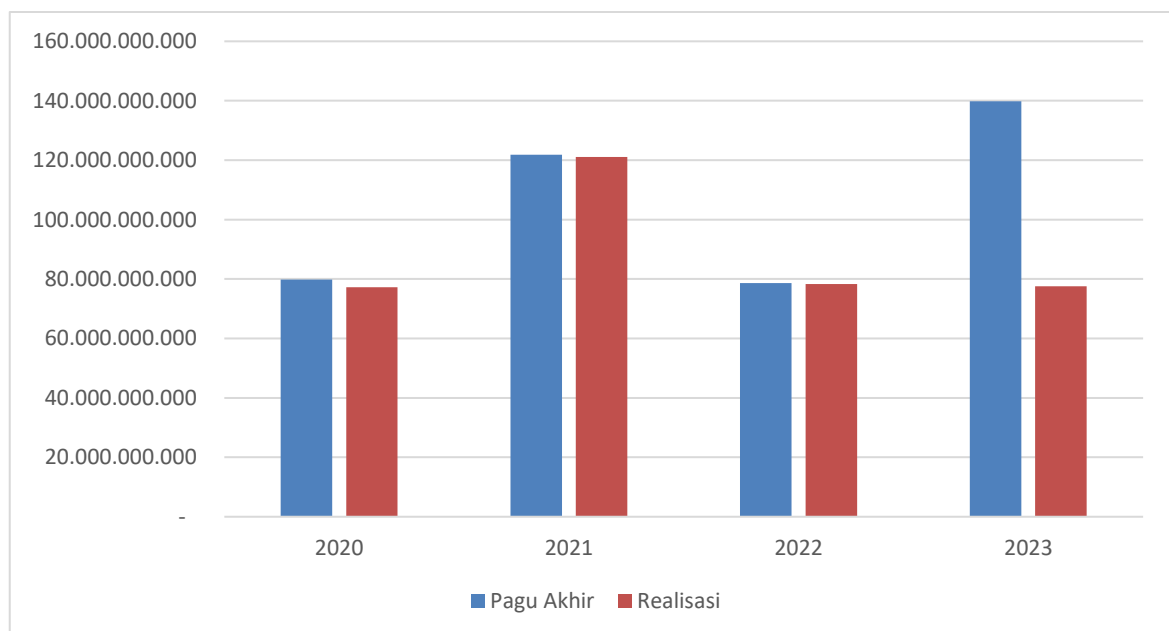
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023 Triwulan III

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	55.554.837.000	79.811.927.000	77.211.002.220	96,74
2	2021	148.262.010.000	121.837.135.000	121.064.932.049	99,37
3	2022	100.083.085.000	78.614.942.000	78.332.449.923	99,64
4	2023	138.192.830.000	139.827.456.000	77.533.127.871	55,45



Gambar III.2. Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun **2020** anggaran yang terserap sebesar Rp. 77.211.002.220,- atau mencapai 96,74% dari pagu akhir Rp. 79.811.927.000,-. Dan pada tahun **2021** daya serap sebesar Rp. 121.064.932.049,- atau mencapai 99,37% dari pagu akhir Rp. 121,837,135,000,-. Dan pada tahun **2022** daya serap sebesar Rp. 78.332.449.923,- atau mencapai 99,64% dari pagu akhir Rp. 78.614.942.000,-. Serta pada tahun **2023** Triwulan II serapan anggaran sebesar Rp. 38.332.887.117,- atau mencapai 27,74% dari pagu akhir Triwulan II Rp. 138.192.830.000,-. Pada tahun **2023** Triwulan III serapan anggaran sebesar Rp. 77.533.127.871,- atau mencapai 55,45% dari pagu akhir triwulan III Rp. 139.827.456.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.9. Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
022.03	BPTD Kalsel	138.192.830.000	138.192.830.000	11.900.079.121	8,61	138.192.830.000	38.332.887.117	27,74	139.827.456.000	77.533.127.871	55,45
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	128.753.012.000	128.753.012.000	8.008.577.700	6,22	128.753.012.000	31.846.376.582	24,73	128.753.012.000	68.640.408.208	53,31
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	23.273.605.000	23.273.605.000	1.031.536.754	4,43	23.273.605.000	4.503.608.654	19,35	23.273.605.000	14.747.252.075	63,36
4638	Pelayanan Transportasi Darat	43.202.563.000	43.202.563.000	895.229.024	2,07	43.202.563.000	11.462.761.163	26,53	43.202.563.000	14.936.789.289	34,57
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	56.795.172.000	56.795.172.000	4.849.959.153	8,54	56.795.172.000	13.580.691.712	23,91	56.795.172.000	35.273.596.937	62,11
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.481.672.000	5.481.672.000	1.231.852.764	22,47	5.481.672.000	2.299.315.053	41,95	5.481.672.000	3.682.769.907	67,18
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	9.439.818.000	9.439.818.000	3.891.501.421	41,22	9.439.818.000	6.486.505.535	68,71	11.074.444.000	8.892.719.663	80,3
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	17.000.000	-	-	0	17.000.000	17.000.000	100	17.000.000	17.000.000	100

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.038.173.000	5.038.173.000	1.842.292.396	36,57	5.038.173.000	3.140.224.076	62,33	5.038.173.000	4.032.280.910	80,03
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	4.384.645.000	4.564.096.000	2.049.205.025	46,74	4.384.645.000	3.329.281.459	75,93	4.384.645.000	4.843.438753	80,47

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 77.533.127.871,-** atau mencapai 55,45% dari pagu akhir **Rp139.827.456.000,-**

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.10. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja triwulan III Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp.	Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	Belanja Pegawai	4.384.645.000	2.049.209.025	46,74	4.384.645.000	3.329.281.459	75,93	6.019.271.000	4.668.331.448	77,56
2	Belanja Barang	54.705.995.000	5.988.693.271	10,95	54.705.995.000	17.313.001.567	31,65	54.705.995.000	39.599.953.462	72,39
3	Belanja Modal	79.102.190.000	3.862.176.825	4,88	79.102.190.000	17.163.527.493	21,70	79.102.190.000	32.741.553.656	41,39
TOTAL		138.192.830.000	11.900.079.121	8,61	138.192.830.000	37.805.810.519	27,74	139.827.456.000	77.009.838.566	55,07

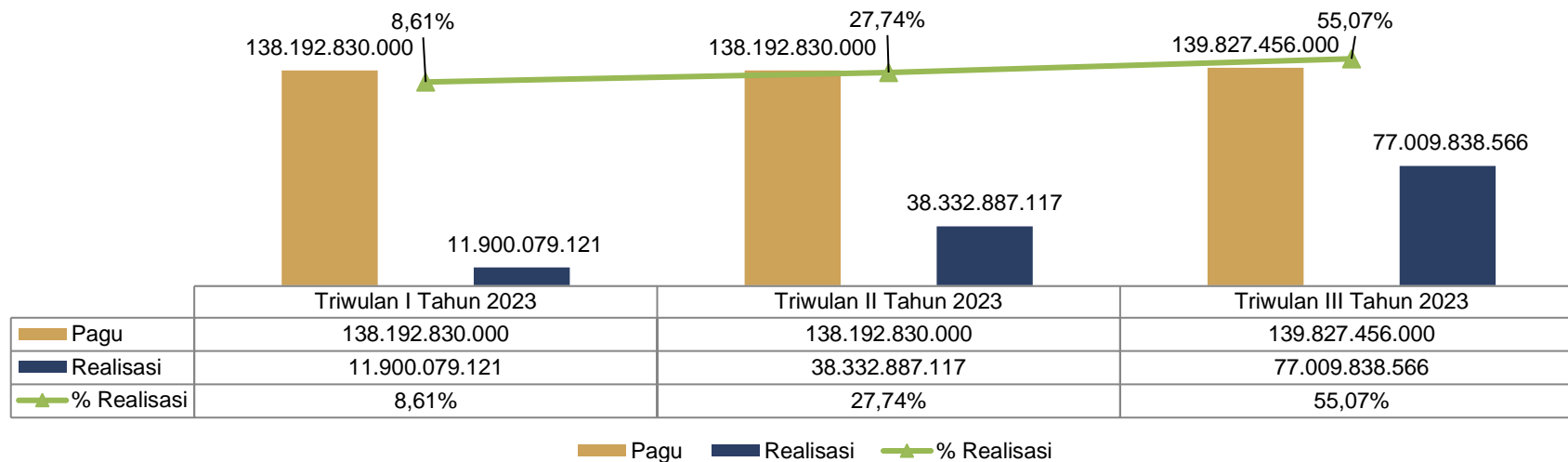
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2023 Triwulan I realisasinya sebesar 8,61% dan pada Triwulan II sebesar 27,74% serta pada Triwulan III sebesar 55,07%.

II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.11. Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I-III 2023

NO	SUMBER DANA	ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp.	Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	Rupiah Murni	67.589.858.000	11.464.975.996	16,96	67.589.858.000	27.083.922.274	40,07	69.224.484.000	52.188.185.108	75,39
2	PNBP	41.438.239.000	435.103.125	1,05	41.438.239.000	10.543.349.695	25,44	41.438.239.000	13.945.011.490	33,65
3	SBSN	29.164.733.000	-	-	29.164.733.000	-	-	29.164.733.000	10.876.641.968	37,29
TOTAL		138.192.830.000	11.900.079.121	8,61	138.192.830.000	38.332.887.117	27,74	139.827.456.000	77.009.838.566	55,07



Gambar III.3. Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I-III Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2023 dari Triwulan I realisasi sebesar 8,61% dan pada Triwulan II realisasi sebesar 27,74% serta pada Triwulan III sebesar 55,07%.

II.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.12 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	6.019.271.000	4.668.331.448	1.350.939.552
2	Belanja Barang	54.705.995.000	39.599.953.462	15.106.041.538
3	Belanja Modal	79.102.190.000	32.741.553.656	46.360.636.344
TOTAL		139.827.456.000	77.009.838.566	62,817,617,434

Tabel II.13 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	69.224.484.000	52.188.185.108	17.036.298.892
2	PNBP	41.438.239.000	13.945.011.490	27.493.227.510
3	SBSN	29.164.733.000	10.876.641.68	10.876.641.968
TOTAL		139.827.456.000	77.009.838.566	62.817.617.434

Tabel II.14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		-
3	Sisa Kontraktual	118.392.904.000	61.462.582.513
	a. Belanja Barang	39.780.754.000	28.991.726.295
	b. Belanja Modal	78.612.150.000	32.470.856.218
4	Sisa Non Kontraktual	15.415.281.000	11.227.106.605
	a. Belanja Barang	14.925.241.000	10.956.409.167
	b. Belanja Modal	490.040.000	270.697.438
5	Sisa Belanja Pegawai	6.019.271.000	4.668.331.448

II.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.15. Efisiensi anggaran

No	Sasaran Program	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Triwulan III)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda Transportasi	62,5	14,58	50,92	75,74	46,84	28,9	88,82	62,81	24,94
2	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	25	17,57	7,43	50	38,05	11,95	75	74,24	0,76
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	50	13,79	4,96	80	39,75	22,75	100	73,81	26,19
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi darat	25	17,67	7,33	50	47,69	2,31	75	67,18	7,82

No	Sasaran Progam	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Triwulan III)
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	25	35,25	-10,25	50	88,04	-38,04	75	82,34	-7,34
Rata-Rata		37,5%	19,77%	17,73%	61,15%	52,07%	9,08%	82,76	72,08	10,68

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Triwulan III sebesar 82,76% dengan realisasi anggaran (capaian keuangan) sebesar 72,08% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 10,68%.

II.5 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran.
3. Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yg menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB III PENUTUP

III. Penutup

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dari 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Program (IKP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Triwulan III tahun 2023, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 75% (target 100%) tercapai 75% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (target 1 lokasi) tercapai 100% ;
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 75% (target 100%) tercapai 75%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 8 lokasi (target 8 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 67,5% (target 90%) tercapai 75%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 75% (target 100%) tercapai 75%;

7. Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
8. Jumlah Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 37,44% (target 50%) tercapai 125%;
9. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1200 orang (target 1200 orang) tercapai 100%;
10. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 67,5% (target 90%) tercapai 75%;
11. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
12. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 63,75 (target senilai 85) tercapai 75%;
13. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 60 (target senilai 80) tercapai 75%;

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan ;

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoa transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	75	75%	BELUM TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	-Seksi Lalin -Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA					
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanankeperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	75	75%	BELUM TERCAPAI	Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana	
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yangberoperasi	lokasi	8	8	8	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 	Seksi Prasarana	
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan StandarPelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A	%	90	90	67,55	75%	BELUM TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	75	75%	BELUM TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dim mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Telah selesai pelaksanaan realisasi fisik dilapangan	Seksi Lalin

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
		IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	50	37,44	125%	TERCAPAI	akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB	Seksi Prasarana
		IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1200	1200	1200	100%	TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan Telah Terlaksana sesuai target	Seksi Sarana
		IKP 7a	Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	90	67,5	75%	BELUM TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh kab/kota di Kalsel; Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 	Seksi Sarana
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Telah selesai pelaksanaan realisasi fisik dilapangan	Seksi Lain

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa ndukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukunganteknis transportasi darat	nilai	85	85	63,75	75%	BELUM TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Peningkatan motivasi bagi pegawai bptd kalimantan selatan; 2. Melakukan Pengiriman pegawai diklat 3. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 4. Melakukan Penyusunan sakisip, lkip, profil bptd 5. Melakukan Rapat teknis/ koordinasi/ konsolidasi 6. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 7. Melakukan Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat 8. Melakukan Monitoring dan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat 9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun 10. Melakukan Penilaian andalalin di provinsi kalimantan selatan 11. Melakukan Biaya penyidikan dan pendampingan pasal 277 uu 22 tahun 2009 tentang Ila 12. Melakukan Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Lain - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha

											13. Ila (bptd) Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja angkutan komersil dan perintis 14. Melakukan Monitoring alur pelayaran sungai dan danau (das barito dan danau riam kanan) 15. Melakukan Monitoring dan pelayanan transportasi sdp 16. Melakukan Pendataan dan pengukuran kapal sungai dan danau 17. Melakukan Ramp check kapal penyeberangan 18. Melakukan Monitoring dan pengawasan pemenuhan spm kapal 19. Melakukan Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana ditjen perhubungan darat 20. Melakukan Inhouse consultant	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80	80	60	75%	BELUM TERCAPAI	Managemen terhadap SDM pegawai BPTD Kelas II Kalsel	Subbag Tata Usaha